



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB III

PELAKSANAAN KERJA MAGANG

3.1 Kedudukan dan Koordinasi

Dari beberapa sub-kanal di *desk* Media Lab, penulis ditempatkan pada sub-kanal Interaktif sebagai reporter. Penulis dibimbing oleh Redaktur *Desk* Media Lab Fitra Moerat, Penanggung Jawab Sub-Kanal Interaktif Krisna Pradipta, dan Penanggung Jawab Sub-Kanal Cek Fakta Angelina Anjar Sawitri. Keterlibatan penanggung jawab sub-kanal Cek Fakta dikarenakan penulis ditugaskan dalam proyek Janji Jokowi. Proyek ini merupakan proyek gabungan sub-kanal Interaktif dengan sub-kanal Cek Fakta. Proyek Janji Jokowi bertujuan untuk memantau pemenuhan janji kampanye Joko Widodo (Jokowi) yang terpilih sebagai presiden Indonesia dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2014 dan tahun 2019. Proyek ini disusun oleh Astrudestra Ajengrastri, *truth buzz fellow of ICFJ for Tempo.co*. Proyek ini menerapkan alur kerja pengecekan fakta dan diterbitkan dalam bentuk interaktif di website JanjiJokowi.tempo.co. Pada kerja praktik magang, penulis hanya berkesempatan untuk berpartisipasi dalam periode pertama pengukuran janji Jokowi untuk tahun 2014. Pada awalnya, Astrudestra merupakan ketua proyek ini sehingga penulis juga sempat berkoordinasi dengannya. Namun, masa kontrak Astrudestra dengan *Tempo.co* berakhir pada 12 Agustus 2019 sehingga proyek ini dialihkan kepada Angelia, penanggung jawab sub-kanal Cek Fakta.

Dalam pelaksanaan tugas, penulis lebih sering berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Sub-Kanal Cek Fakta Angelina Anjar Sawitri. Hal ini dikarenakan sebagian besar kerja proyek merupakan tugas dari sub-kanal Cek Fakta. Penulis juga kerap beberapa kali berkoordinasi dengan Astrudestra mengenai perkembangan proyek atas perintah dari Angelina. Adapun koordinasi dengan Penanggung Jawab Sub-Kanal Interaktif Krisna Pradipta

juga dilakukan ketika berhubungan dengan visualisasi dan memasukkan data ke dalam website publikasi proyek.

3.2 Tugas yang Dilakukan

Tugas penulis sebagai reporter magang adalah mengecek klaim dari janji melalui verifikasi dari berbagai sumber, seperti publikasi resmi pemerintah, publikasi akademik berupa riset, dan liputan media atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Setelah menverifikasi klaim, penulis membuat narasi dari hasil penelusuran klaim. Kemudian, penulis pun memasukan narasi tersebut pada website publikasi Janji Jokowi. Penulis paling sering berdiskusi dengan Penanggung Jawab kanal Cek Fakta mengenai hasil temuan penulis dalam proses verifikasi klaim dan pembuatan narasi dari hasil pengecekan klaim.

Sebelum diizinkan untuk mengecek klaim, penulis diberi arahan secara singkat mengenai cara pengecekan klaim berupa janji kampanye Jokowi. Penulis pun diajarkan untuk memilih sumber-sumber yang dapat menjadi acuan dalam proses verifikasi. Verifikasi dari janji ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pemenuhan janji kampanye tersebut selama periode Jokowi sebagai presiden Indonesia. Oleh karena itu, sumber-sumber ini menjadi penting dalam proyek Janji Jokowi. Setelah pengarahan singkat itu, penulis langsung ditugaskan dalam pengecekan fakta ini pada hari pertama magang di *Tempo.co*. Hal ini berbeda dengan reporter magang di *desk* lain yang diharuskan melakukan pelatihan selama seminggu sebelum ditugaskan meliput ke lapangan. Penulis mendapatkan kesempatan lebih cepat ditugaskan dikarenakan telah mendapatkan pelatihan cek fakta melalui mata kuliah *Digital Fact Checking* pada semester sebelumnya di UMN. Hasil dari penelusuran penulis dikumpulkan di *spread sheet* Google sehingga memudahkan semua reporter mengolah data secara bersama-sama.

Berikut merupakan kegiatan penulis selama magang di *desk* Media Lab.

Tabel 3.1 Kegiatan Kerja Magang

Minggu Ke-	Tanggal	Kegiatan
1	16 Agustus 2019	<p>1. Mengecek klaim dari Janji Jokowi, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perbatasan Indonesia, termasuk perbatasan darat, dengan 10 negara tetangga Indonesia • Kami berkomitmen memperjuangkan pemenuhan kuota perempuan 30% tidak sekedar angka tetapi juga mendorong agar semua partai politik memiliki dan menyiapkan kader politik perempuan yang mumpuni melalui perekrutan, pendidikan politik, kaderisasi dan memberikan akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya. Tindakan ini akan diperjuangkan tidak hanya dalam ranah partai politik, namun juga eksekutif, yudikatif dan legislatif. • Kami akan mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan. • Pengurangan penggunaan

		<p>kendaraan pribadi sebesar 30%. dengan penelusuran dari web kementerian dan media online.</p> <p>2. Membuat narasi dari hasil pengecekan klaim.</p>
2	19-23 Agustus 2019	<p>1. Mengecek klaim dari Janji Jokowi, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kami akan memilih Jaksa Agung dan KAPOLRI yang bersih, kompeten, antikorupsi dan komit pada penegakan hukum. • Kami akan menekan tindak pidana dan mengurangi <i>overcrowding</i> pada Lapas dengan mengembangkan alternatif pemidanaan. • Penerbitan UU wajib belajar 12 tahun dengan membebaskan biaya pendidikan dan segala pungutan baik di sekolah negeri maupun swasta tampak adalah salah satu dari agenda aksi yang perlu dilakukan. Ketentuan wajib belajar ini adalah wujud konkrit dari intervensi kebijakan tersebut. Seiring dengan itu, harus dilakukan upaya yang lebih serius dan lebih banyak untuk memberikan dukungan pendanaan. Dukungan ini dapat dilakukan dengan

		<p>berbagai cara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan akses jalan dan jalur transportasi air untuk 183 kabupaten tertinggal hingga tahun 2024. <p>dengan penelusuran dari web kementerian dan media online.</p> <p>2. Membuat narasi dari hasil pengecekan klaim.</p> <p>3. <i>Cleaning</i> data orang yang terjerat UU ITE</p>
3	28-30 Agustus 2019	<p>1. Mengecek klaim dari Janji Jokowi, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kami berkomitmen untuk membangun sistem penilaian kinerja lembaga penegak hukum berbasis tingkat kepercayaan publik. • Keempat, porsi penerimaan negara dari hasil tambang secara bertahap harus meningkat. • Kami tidak akan memberlakukan lagi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional - termasuk di dalamnya Ujian Akhir Nasional. • Pembangunan terminal-terminal baru untuk bongkar muat terutama di daerah terpencil dan tak lupa menggunakan sungai dan laut-terutama di bagian Timur Indonesia.

		<p>dengan penelusuran dari web kementerian dan media online.</p> <p>2. Membuat narasi dari hasil pengecekan klaim.</p>
4	2-8 September 2019	<p>1. Menginput data klaim ke CMS Janji Jokowi</p> <p>2. Mengecek klaim dari Janji Jokowi dengan penelusuran dari web kementerian dan media online.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan perumahan untuk buruh di kawasan industri tidak dapat ditunda lagi. • Mendukung pengesahan UU Tentang Sistem dan Komite Pengawas Ketenagakerjaan, UU Tentang Sistem Pengupahan dan Perlindungan Upah; UU Tentang Kesehatan, UU Tentang Keperawatan, UU Tentang Kebidanan; UU Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; UU Tentang Ketenagakerjaan; UU Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial; UU Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. • 5000 pasar tradisional yang berumur lebih dari 25 tahun direnovasi dan revitalisasi. • Perencanaan transportasi yang berkelanjutan jangka menengah

		<p>hingga jangka panjang.</p> <p>3. Membuat narasi dari hasil pengecekan klaim.</p> <p>4. Mengikuti pelatihan cek fakta dari Google</p>
5	10-13 September 2019	<p>1. Menginput data ke CMS Janji Jokowi.</p> <p>2. Menyunting data yang sudah diinput.</p> <p>3. Mengecek klaim dari Janji Jokowi dengan penelusuran dari web kementerian dan media online.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan transportasi yang berkelanjutan jangka menengah hingga jangka panjang. • Membangun bandara utama khusus barang. • Pemerintah merancang kebijakan anggaran pembangunan untuk peningkatan sektor pariwisata dengan target output kemampuan untuk mendatangkan jumlah wisatawan asing sejumlah 20 juta sampai dengan 2019 dan target outcome menggerakkan sector ekonomi local dan nasional. • Utang baru hanya ditujukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif dalam rangka meningkatkan potensi output yang memberikan dampak multiplier tinggi di masa yang akan datang (seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan

		<p>pendidikan dan kesehatan).</p> <p>4. Membuat narasi dari hasil pengecekan klaim.</p>
6	16-20 September 2019	<p>1. Menyunting data yang sudah diinput.</p> <p>2. Mengecek klaim dari Janji Jokowi dengan penelusuran dari web kementerian dan media online.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan rute regional. • Kami berkomitmen membangun karakter dan potensi pariwisata, melalui; (1) Pengembangan kawasan pariwisata berbasis pada segitiga emas (<i>golden triangle</i>) pariwisata di titik strategis kawasan Indonesia untuk membangun intersullar tourism dan budaya lokal seperti kawasan bonaken-wakatobi-raja ampat. • Ketersediaan air bersih. • Pengurangan utang negara secara bertahap sehingga rasio utang terhadap PDB mengecil. <p>3. Membuat narasi dari hasil pengecekan klaim.</p>
7	23-27 September 2019	<p>1. Menginput data ke CMS Janji Jokowi</p> <p>2. Mengecek klaim dari Janji Jokowi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menambah rute perintis angkutan udara. • Pengembangan rute kapal laut yang menghubungkan seluruh kepulauan di Indonesia secara efisien termasuk pulau-pulau

		<p>terisolasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subsidi pangan. • Peningkatan realisasi penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
8	4 Oktober 2019	<p>1. Mengecek klaim Janji Jokowi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun infrastruktur ekonomi: Jalan, Jembatan, Pasar, saluran irigasi, pelabuhan, bandara, jalur kereta api, kawasan industri dan pembangkit listrik. • Pembangunan rel KA (rel ganda) antar kota di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. • Implementasi sistem jaminan sosial nasional secara merata di seluruh Indonesia. • Meningkatkan indikator peringkat <i>Ease of Doing Business</i> (peringkat iklim investasi Indonesia) menjadi terkemuka di tingkat Asia. <p>2. Menginput data ke CMS Janji Jokowi</p> <p>3. Merevisi narasi hasil pengecekan karena perubahan format yang awalnya berupa narasi diganti mejadi poin-poin, terdiri dari klaim, metode, hasil temuan, kesimpulan.</p>
9	7-11 Oktober 2019	<p>1. Mengecek klaim Janji Jokowi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi pelabuhan laut yang sudah ada, terutama

		<p>pengembangan Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Bitung sebagai Hub Port berkelas internasional, Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar dan Sorong.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penindakan hukum terhadap kapal-kapal asing yang melayani perairan nusantara. • Implementasi pelayanan publik dasar yang prima melalui pembangunan 50.000 rumah sehat dan mengembangkan 6000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap. • Kami berkomitmen untuk membangun penguatan sektor keuangan berbasis nasional, Melalui (1) menggunakan instrumen-instrumen regulasi. Regulasi- regulasi yang sangat penting yang harus dilakukan antara lain (a) pembatasan penjualan saham bank nasional kepada asing. <p>2. Menginput data ke CMS Janji Jokowi</p> <p>3. Merevisi narasi hasil pengecekan karena perubahan format yang awalnya berupa narasi diganti mejadi poin-poin, terdiri dari klaim, metode, hasil temuan, kesimpulan.</p>
10	14-19 Oktober	1. Mengecek klaim Janji Jokowi

	2019	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan terminal-terminal baru untuk bongkar muat terutama di daerah terpencil dan tak lupa menggunakan sungai dan laut-terutama di bagian Timur Indonesia. • Pembangunan akses jalan dan jalur transportasi air untuk 183 kabupaten tertinggal hingga tahun 2024. • Peningkatan akses penduduk miskin pada pendidikan formal dan pelatihan ketrampilan yang gratis melalui upaya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5-6% pada 2019. • Pelarangan kebijakan alih tenaga kerja di BUMN. <p>2. Merevisi narasi hasil pengecekan karena perubahan format yang awalnya berupa narasi diganti mejadi poin-poin, terdiri dari klaim, metode, hasil temuan, kesimpulan.</p>
11	21-25 Oktober 2019	<p>1. Mengecek klaim Janji Jokowi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelebaran jalan dan penambahan jalan baru, Menyediakan dana ganti rugi lahan untak pelebaran dan penambahan jalan. • Pangsa moda transportasi KA perkotaan naik menjadi 10%. • Kami berkomitmen untuk membangun perimbangan

		<p>pembangunan kawasan melalui; (1) Meningkatkan pembangunan berbagai fasilitas produksi, pendidikan, kesehatan, pasar tradisional dan lain-lain di pedesaan, daerah terpencil dan tertinggal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keenam, pengurangan secara drastis konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan tambang. <p>2. Merevisi narasi hasil pengecekan yang telah dicek editor.</p> <p>3. <i>Cleaning</i> data UU ITE</p>
12	28 Oktober - 2 November 2019	<p>1. Mengecek klaim Janji Jokowi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pangsa moda transportasi KA antar kota naik menjadi 10%. • Bertambahnya kapal domestik. • Pembangunan 100 sentra perikanan sebagai tempat pelelangan ikan terpadu dengan penyimpanan dan pengolahan produk perikanan terpadu. • Kami berkomitmen untuk merancang strategi cerdas untuk mengatasi kelangkaan listrik, mengurangi biaya produksi, mengeliminasi subsidi, dan meningkatkan rasio elektrifikasi sampai 100%. <p>2. Merevisi narasi hasil pengecekan yang telah dicek editor.</p> <p>3. Menginput data klaim yang <i>uncheckable</i></p>

		<p>ke CMS Janji Jokowi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kami akan membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global. ➤ Kami berkomitmen untuk mengedepankan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan (<i>archipelagic state</i>) dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerjasama internasional. ➤ Kami akan mengamankan sumberdaya alam dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. ➤ Kami akan mengintensifkan diplomasi pertahanan. ➤ Kami akan meningkatkan peran global melalui diplomasi middle power yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, dengan memberi prioritas pada permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.
13	4-10 November 2019	<p>1. Menginput data klaim yang <i>uncheckable</i> ke CMS Janji Jokowi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kami akan mengedepankan dan aktif dalam mendorong kerjasama

		<p>multilateralisme regional dan global, termasuk penguatan PBB, aktif dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan mendorong reformasi lembaga-lembaga keuangan internasional Bretton Wood khususnya <i>World Bank</i> dan <i>International Monetary Fund</i> (IMF).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kami akan memperkuat peran Indonesia sebagai negara demokratis dan berpenduduk mayoritas Muslim moderat dalam mendorong kerjasama global dan regional untuk membangun demokrasi dan toleransi antar kelompok. ➤ Kami akan memperjuangkan kerjasama yang berimbang dan relevan di G20. ➤ Kami akan mengintensifkan kerjasama internasional dalam mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia seperti penyakit menular, perubahan iklim, penyebaran senjata ringan illegal, perdagangan manusia, kelangkaan air, ketahanan energi, dan penyebaran narkoba. ➤ Kami akan meningkatkan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) sebagai bagian
--	--	--

		<p>dari perjuangan membangun kerjasama internasional dan tatanan dunia yang lebih adil, sejajar dan saling menguntungkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kami akan berperan aktif dalam penyelesaian konflik (<i>conflict resolution</i>), penjagaan perdamaian (<i>peace-keeping</i>) dan bina perdamaian (<i>peace-building</i>). ➤ Kami akan mendorong penempatan putra-putri terbaik Indonesia di dalam organisasi internasional dan regional, khususnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), OKI, dan Sekretariat ASEAN. ➤ Kami akan memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo-Pasifik dengan fokus pada kawasan Indo-Pasifik, "mengintegrasikan" dua samudera -Samudera Hindia dan Samudera Pasifik- sebagai lingkungan strategis pelaksanaan politik luar negeri di kawasan. ➤ Kami akan mengkonsolidasi kepemimpinan Indonesia di ASEAN serta memperkuat kerjasama dan menjamin sentralitas ASEAN. ➤ Kami akan memperkuat arsitektur regional (khususnya <i>East Asia Summit</i>) yang mampu mencegah
--	--	---

		<p>hegemoni kekuatan besar.</p> <p>2. Memverifikasi kasus dari data UU ITE</p>
14	11-15 November 2019	<p>1. Memverifikasi kasus dari data UU ITE</p> <p>2. Cleaning data Trenggiling</p> <p>3. Mengecek data DPR (jumlah kursi, dll)</p> <p>4. Menginput data klaim yang <i>uncheckable</i> ke CMS Janji Jokowi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kami akan memperkuat dan mengembangkan kemitraan strategis bilateral. ➤ Kami akan mengelola dampak integrasi ekonomi regional dan perdagangan bebas terhadap kepentingan ekonomi nasional Indonesia. ➤ Kami akan mendorong kerjasama maritim komprehensif (<i>comprehensive maritime cooperation</i>) di kawasan, khususnya melalui <i>Indian Ocean Rim Association</i> (IORA). ➤ Kami akan mendorong perluasan partisipasi publik dalam proses kebijakan dan diplomasi, khususnya melalui penguatan diplomasi publik. ➤ Kami akan meningkatkan koordinasi baik antar Kementerian maupun dengan DPR dalam politik luar negeri. ➤ Kami akan memperkuat sistem dan

		<p>penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kami akan mengarahkan pembangunan kekuatan pertahanan tidak sekedar untuk memenuhi kekuatan pertahanan minimum (<i>minimum essential force</i>), namun ditujukan untuk membangun TNI sebagai kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur. ➤ Kami akan memulihkan kepercayaan publik dengan melakukan pembinaan terus menerus atas mental dan disiplin anggota POLRI demi membangun POLRI yang profesional dan dipercaya oleh masyarakat. ➤ Kami akan melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan POLRI untuk memudahkan dan memastikan arah gerak penataan dan pengelolaan POLRI untuk lebih baik, dan menegaskan arah gerak POLRI agar selaras dengan agenda pemerintahan. ➤ Kami akan melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan POLRI, mengacu pada perencanaan penataan keamanan nasional,
--	--	---

		<p>dengan berbasis pada arah kebijakan penataan POLRI menjadi institusi profesional.</p> <p>5. Menyunting data yang sudah diinput</p>
15	18-22 November 2019	<p>1. Menginput data klaim yang <i>uncheckable</i> ke CMS Janji Jokowi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kami akan membangun sistem keamanan nasional yang integratif, menata hubungan antara POLRI dengan institusi lain sebagai bagian dari penataan kelembagaan dan kewenangan, baik dengan institusi keamanan dan/atau institusi lainnya. ➤ Kami akan menyediakan anggaran yang memadai untuk POLRI, baik untuk tugas operasional, dukungan peralatan maupun jaminan kesejahteraan anggota POLRI. ➤ Kami akan mewujudkan profesionalitas intelijen negara. ➤ Kami akan melakukan evaluasi kepemimpinan Badan Intelijen Negara (BIN) dengan berbasis pada kebutuhan ancaman dan penataan kelembagaan BIN. ➤ Kami akan menegaskan dan memperkuat keberadaan Komite Intelijen Pusat dan Komite Intelijen Daerah sebagai forum yang dapat mengintegrasikan dan menyelaraskan koordinasi dan

		<p>kerja sama antar unit intelijen agar berirama sama dalam menjaga kepentingan bangsa dan negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kami akan mengintegrasikan kerja sama antar unit intelijen negara dalam bentuk program bersama ataupun dalam bentuk operasionalisasi tematik. ➤ Kami akan menjalankan secara konsisten UU No. 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. ➤ Kami akan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. ➤ Kami akan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. <p>2. Mencari <i>update</i> dari kasus di data UU ITE</p> <p>3. Membuat narasi UU ITE yang baru</p> <p>4. Menyunting klaim yang sudah diinput ke CMS Janji Jokowi</p>
16	26-29 November	1. Mencari <i>update</i> dari kasus di data UU

	2019	<p>ITE</p> <p>2. Membuat narasi UU ITE yang baru</p> <p>3. Menginput data klaim yang <i>uncheckable</i> ke CMS Janji Jokowi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kami akan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. ➤ Klaim ini tidak diverifikasi karena tidak mengandung parameter yang bisa diukur dengan indikator yang obyektif. ➤ Kami akan memfasilitasi promosi dan keterlibatan rakyat dalam pendidikan kebudayaan, pengelolaan lokasi dan dukungan kebijakan untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis pada <i>eco-tourism</i>. ➤ Kami berkomitmen untuk mengembangkan kapasitas perdagangan nasional melalui peningkatan daya saing produk nasional melalui peningkatan kualitas-pencitraan-harga-servis. ➤ Kami akan mempromosikan produk manufaktur nasional dan pengembangan industri kecil dan menengah serta koperasi untuk
--	------	---

		<p>meningkatkan nilai tambahnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kami akan memfasilitasi kemitraan antara industri dan perguruan tinggi dalam kerjasama penelitian dan pengembangan untuk pengetahuan dan teknologi yang dapat diaplikasikan untuk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional. ➤ Kami akan menata kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (<i>civic education</i>), yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti: pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela Negara dan budi pekerti dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. ➤ Kami berkomitmen untuk memperjuangkan agar biaya pendidikan terjangkau bagi seluruh warga negara. ➤ Kami berkomitmen memperjuangkan pembentukan kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal (daerah) dan aspek nasional, dalam
--	--	--

		<p>rangka membangun pemahaman yang hakiki terhadap ke-bhinekaan yang Tunggal Ika.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kami akan meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa. ➤ Kami akan meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berienjang, dan berkelanjutan. ➤ Meningkatkan Pembibitan dan Pengembangan Prestasi Olahraga. ➤ Kami akan meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olah raga. ➤ Kami akan mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan. <p>4.Menyunting klaim yang sudah diinput ke CMS Janji Jokowi</p>
--	--	---

Dalam proyek Janji Jokowi ini, klaim yang bisa dicek sebanyak 126 klaim dari 445 klaim. Penulis telah memverifikasi 48 klaim dari 126, membuat narasi hasil pengecekan sebanyak 48 narasi dari 126, dan menginput data ke CMS Janji Jokowi sebanyak 95 klaim dari 445, terdiri

dari 48 klaim *checkable* dan 47 klaim *uncheckable*. Adapun proyek ini belum dapat dipublikasikan dikarenakan belum adanya perintah dari Pemimpin Redaksi *Tempo.co*.

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang

3.3.1 Proses Kerja di *Desk Media Lab*

Ada beberapa tahapan dalam mengerjakan pengecekan fakta dalam proyek Janji Jokowi pada subkanal cek fakta selama 60 hari magang. Adapun tahapan-tahapan pengecekan fakta tersebut dikutip dari Mantzarlis (2018, p. 84) adalah sebagai berikut.

1. Menemukan Klaim

Penemuan klaim pada tahap ini dapat dilakukan dengan menelusuri dokumen legislatif, outlet media, dan media sosial. Setelah menemukan klaim, pengecek fakta akan menentukan klaim yang dapat diperiksa faktanya (*checkable*) dan klaim yang tidak diperiksa faktanya (*uncheckable*).

2. Menemukan Fakta dari Klaim

Tahapan ini adalah menemukan fakta dari klaim yang telah ditentukan dapat diperiksa faktanya. Penemuan fakta dilakukan dengan mencari bukti terbaik mengenai klaim dengan menelusuri berbagai sumber.

3. Mengevaluasi Klaim Berdasarkan Bukti

Tahap evaluasi dilakukan ketika penelusuran fakta telah selesai. Klaim-klaim tersebut pada tahapan ini akan dikoreksi kebenarannya berdasarkan temuan dari pengecekan fakta. Biasanya, tahapan ini akan menentukan skala kebenaran dari klaim.

3.3.1.1 Tahap Penemuan Klaim

Menurut Mantzarlis (2018, p. 84), pengecekan fakta diawali dengan menemukan klaim yang akan diperiksa. Klaim-klaim pada proyek Janji Jokowi ditemukan dari dokumen visi dan misi Jokowi -

Jusuf Kalla (JK) yang telah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum ketika pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Visi misi tersebut dipecah-pecah menjadi klaim-klaim. Lalu, Klaim-klaim tersebut berupa janji-janji dari pasangan. Kemudian, klaim tersebut dikategorikan menjadi klaim yang bisa dicek (*checkable*) dan klaim yang tidak bisa dicek (*uncheckable*).

Namun pada praktik kerja magang, penulis tidak ditugaskan untuk menemukan klaim-klaim yang akan dicek. Klaim-klaim ini ditemukan dan ditentukan oleh redaksi Media Lab. Terdapat 445 klaim dari dokumen visi misi Jokowi-JK dan 126 di antaranya adalah klaim yang dapat dicek kebenarannya (*checkable*). Klaim-klaim tersebut dipilah di *spread sheet* Google.

Klaim yang dapat dicek kebenarannya mengandung setidaknya satu fakta atau angka (Mantzaris, 2018, p. 89). Fakta atau angka ini dapat diverifikasi kebenarannya secara objektif. Pengecekan fakta tidak menilai kebenaran pendapat, hiperbola, sindiran, dan lelucon (Mantzaris, 2018, p. 89). Dalam proyek Janji Jokowi ini, klaim yang dapat dicek merupakan janji yang konkret keberhasilan, kegagalan, atau kemajuannya sehingga tidak terbantahkan (Ajengrastri, 2019, p. 4). Contohnya, janji untuk membuat negara dengan ekonomi kuat. Indikator ekonomi kuat dapat diukur dengan peringkat kredit suatu negara atau tingkat inflasi. Namun, janji seperti ini dalam proyek Janji Jokowi tidak dapat diverifikasi karena ukuran kemajuan ekonomi ditentukan dari interpretasi dari definisi ekonomi kuat. Ukuran seperti ini dapat berpotensi salah karena bergantung subjektivitas dari pengecek fakta (Ajengrastri, 2019, p.4).

Salah satu janji yang dapat diverifikasi kebenarannya dalam proyek ini berbunyi "Kami akan **meningkatkan upaya pengamanan khusus wilayah kelautan** guna mencegah *illegal fishing*, dan mengamankan jalur transportasi untuk penindakan tegas terhadap berbagai kegiatan illegal termasuk didalamnya *illegal logging* dan *illegal mining*". Dalam

proyek ini janji ditulis secara lengkap sesuai dengan dokumen asli pada Visi Misi Jokowi-JK yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2014. Setiap janji yang dapat diverifikasi memiliki kalimat yang dicetak tebal. Kalimat cetak tebal tersebut adalah klaim yang dapat diverifikasi kebenarannya atau inti dari janji tersebut. Peningkatan upaya pengamanan ini dapat diverifikasi karena merupakan klaim tersebut mengandung sesuatu yang dapat berupa fakta atau data.

Adapun klaim yang tidak diverifikasi dalam proyek ini satu di antaranya berbunyi "Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara". Klaim ini tidak diverifikasi karena tidak memiliki indikator yang jelas untuk mengukur kebenaran klaim.

Gambar 3.1 Visi Misi Jokowi-JK Sebelum Disortir

JANJI JOKOWI - PERIODE 1	DIVERIFIKASI	TIDAK DIVERIFIKASI
Details (ada di 42 halaman Visi Misi dan Program Aksi yang diserahkan kepada KPU pada Mei 2014)		
VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERDASARKAN GOTONG ROYONG		
MISI:		
1 Mewujudkan Keamanan Nasional yang Mampu Menjaga Kedaulatan Wilayah, Menopang Kemandirian Ekonomi dengan Mengamankan Sumberdaya Maritim, dan Mencerminkan Kepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan.		
2 Mewujudkan Masyarakat Maju, Berkeseimbangan dan Demokratis Berlandaskan Negara Hukum.		
3 Mewujudkan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif dan Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim.		
4 Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Yang Tinggi, Maju dan Sejahtera.		
5 Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya-Saing.		
6 Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional		
7 Mewujudkan Masyarakat yang Berkepribadian dalam Kebudayaan.		
12 agenda strategis dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam bidang politik		
16 agenda strategis untuk menuju Indonesia yang berdikari dalam bidang ekonomi		
3 agenda strategis untuk Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.		
31 agenda strategis itu diperas lagi menjadi sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan.		
DETAILS		
Note: Verifiable promises are in bold		
SEMBILAN AGENDA PRIORITAS: NAWA CITA		
1 NAWACITA No.1 : Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.		X
2 Nawacita 1: Kami akan melaksanakan politik luar negeri bebas aktif.		X
3 Nawacita 1: Kami akan membangun keamanan nasional yang terpercaya dan melaksanakan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.		X

Gambar 3.2 Klaim *Checkable* dan *Uncheckable*

No	KLAIM	STATUS
1	Nawacita poin 1: Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.	Tidak Diverifikasi
2	Nawacita poin 1.1: Kami akan melaksanakan politik luar negeri bebas aktif.	Tidak Diverifikasi
3	Nawacita poin 1.2: Kami akan membangun keamanan nasional yang terpercaya dan melaksanakan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.	Tidak Diverifikasi
4	Nawacita 1.3: Kami akan melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya pekerja migran.	Tidak Diverifikasi
5	Nawacita 1.4. Kami akan mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan maritim, dan sumber daya alam.	Tidak Diverifikasi
6	Nawacita 1: Kami akan memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional untuk membangun saling pengertian antar peradaban, memajukan demokrasi dan perdamaian dunia.	Tidak Diverifikasi
7	Nawacita 1: Kami akan meningkatkan kerjasama pembangunan Selatan-Selatan, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia.	Tidak Diverifikasi
8	Nawacita 1: Kami akan meminimalisasi dampak dari globalisasi, mendorong integrasi ekonomi regional dan perdagangan bebas terhadap kepentingan ekonomi nasional Indonesia.	Tidak Diverifikasi
9	Nawacita 1: Kami akan menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan untuk mendukung terbentuknya TNI profesional baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista secara terpadu di ketiga matra pertahanan.	Tidak Diverifikasi
10	Nawacita 1: Kami menargetkan peningkatan anggaran pertahanan 1,5 persen dari GDP dalam lima tahun.	Gagal

3.3.1.2 Tahap Penemuan Fakta dari Klaim

Penugasan pertama yang diterima penulis adalah menemukan fakta dari klaim. Penemuan fakta dari klaim merupakan pekerjaan penting seorang pengecek fakta. Oleh karena itu, penulis diberi arahan langsung oleh Astudestra selaku ketua proyek Janji Jokowi. Arahan ini diberikan secara langsung di ruang redaksi. Tidak ada rapat redaksi untuk menentukan penunjukkan tugas-tugas. Hal ini dikarenakan tim proyek Janji Jokowi hanya terdiri dari Astudestra dan penulis sendiri. Setelah Astudestra tidak lagi menjadi ketua pun tidak ada rapat redaksi, Angelina

memutuskan untuk melanjutkan proyek sesuai alur Astrudestra. Bahkan setelah penambahan anggota magang pun alur kerja tetap sama.

Adapun arahan dari Astudestra adalah menjelaskan bagian-bagian dari klaim-klaim yang telah disortir pada *spread sheet*. Adapun klaim-klaim yang *checkable* dipisahkan lagi di *worksheet* baru. Astudestra telah membagi klaim-klaim tersebut menjadi beberapa kategori, yaitu Hubungan Internasional, Pertahanan dan Keamanan, Informasi dan Layanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan, Kebijakan Afirmatif, Buruh Migran, Penegakan Hukum, Pertanian dan Reforma Agraria, Energi, Ketenagakerjaan, Investasi, Infrastruktur, Maritim, Pemerataan Pembangunan, Pariwisata, Perdagangan, Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, klaim-klaim tersebut akan diberikan status, yaitu gagal, tidak ada bukti, dalam proses, dan terpenuhi setelah diverifikasi faktanya. Penjelasan mengenai masing-masing status dikutip dalam proposal Janji Jokowi (Ajengrastri, 2019, p. 6) adalah sebagai berikut.

1. Status Gagal

Status gagal pada janji ketika ditemukan keterangan dari pemerintah untuk tidak mewujudkan janji. Sebuah janji yang gagal juga dapat diartikan ketika kurangnya bukti kemajuan yang dapat ditemukan pada catatan publik. Oleh sebab itu, asumsi digunakan untuk menyatakan bahwa tidak akan ada kemajuan dalam janji yang akan dilaksanakan.

2. Status Tidak Ada Bukti

Tidak adanya bukti kemajuan yang dapat ditemukan dalam catatan publik sehingga janji diberi status "Tidak Ada Bukti".

3. Status Dalam Proses

Janji diberi status "Dalam Proses" dikarenakan pemerintah telah melakukan sesuatu untuk memenuhi janji. Namun, status ini dapat berubah menjadi gagal atau terpenuhi bergantung dengan upaya pemerintah dalam meneruskan pemenuhan janji.

4. Status Terpenuhi

Janji mendapatkan status "Tepenuhi" apabila pemerintah telah mewujudkan janji dengan bukti pencapaian dari janji. Namun, perlu berhati-hati dengan janji yang terlihat hampir terpenuhi untuk dinyatakan bahwa janji terpenuhi. Hal itu dikarenakan ada kemungkinan terjadi peristiwa tidak terduga sehingga janji tidak tercapai.

Kemudian, penulis mendapatkan penjelasan tentang metode dalam pengecekan klaim yang berupa janji-janji Jokowi-JK. Semua klaim dicek menggunakan sumber informasi daring. Sumber informasi utama dalam pengecekan fakta dari janji tersebut adalah informasi resmi dari pemerintah atau badan-badan pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selain itu, sumber informasi lainnya yang terkategori sebagai sumber menegah adalah sumber dari lembaga riset maupun kampus, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Selanjutnya, klaim tersebut juga dapat dicek dengan sumber biasa, yaitu informasi dari hasil liputan media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti *Tempo.co*, *Kompas.com*, *Tirto.id*, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Dalam proses pengerjaannya, Astudestra tidak memberikan arahan detail klaim mana yang harus didahulukan untuk dicek. Penulis pun mengecek klaim-klaim yang telah tertera di *spread sheet* secara acak. Kategori dalam *spread sheet* itu terdiri dari Janji, Status, *Burden of Truth*, dan Narasi.

Gambar 3.3 Kategori di *Spread Sheet*

JANJI JOKOWI - PERIODE 1		VERIFIABLE	UKURAN KEBERHASILAN	STATUS	BURDEN OF TRUTH
HUBUNGAN INTERNASIONAL					
1	Diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perbatasan Indonesia, termasuk perbatasan darat, dengan 10 negara tetangga Indonesia; --> Diplomasi Maritim dengan 10 Negara Tetangga (Sudah diinput)	X	- Tercapai kesepakatan / MoU batas wilayah dengan 10 negara berbeda	Gagal	https://kompas.id/baca/internasional/ https://kumparan.com/@kumparanne https://telusur.co.id/2018/10/kegagalan/ Diplomasi maritim dikategorikan men maritime diplomacy, dimana aktor uti melakukan dialog sebagai upaya dalar Indonesia adalah : (1) Laut teritorial yang belum diselesa (2) Batas Zona Eksklusif [ZEE] masih m (3) Landas kontinen belum dilakukan : Berdasarkan Fenomena itu, masih bar mengenai batas laut Indonesia https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/si-18-08-04-40.pdf

Keterangan: Gambar diambil pada Maret 2020 sehingga terdapat perubahan dalam kategori. Perubahan tersebut terjadi setelah penulis tidak magang lagi di *Tempo.co*.

Gambar 3.4 Kategori di *Spread Sheet*

TEKS NARASI

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjanjikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Salah satunya bisa dilihat dalam janji di ranah hubungan internasional, di mana Jokowi-JK berkomitmen mengedepankan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi internasional.

Salah satu agenda aksi dalam menifesto janji 2014 adalah untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perbatasan Indonesia, termasuk perbatasan darat, dengan 10 negara tetangga: Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua Nugini, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

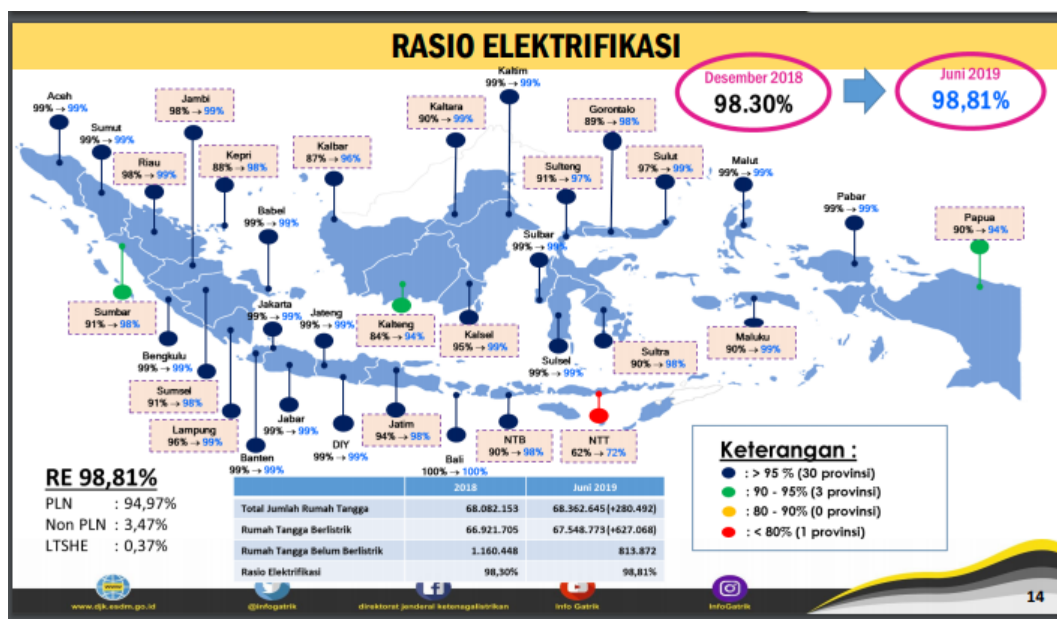
Ada tiga jenis batas maritim yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yakni laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Negara berhak mengklaim laut teritorial selebar 12 mil laut dari garis pangkal. Selain itu, negara juga berhak mengklaim teritori selebar 200 mil laut dari garis pangkal, yang meliputi permukaan laut (ZEE) dan dasar laut (landas kontinen).

Wilayah laut teritorial selebar 12 mil laut dari garis pangkal yang berhak diklaim Indonesia tumpang tindih dengan empat negara yang sama-sama berhak atas wilayah itu, mereka adalah Malaysia, Singapura, Papua Nugini, dan Timor Leste. Untuk wilayah ZEE dan landas kontinen yang selebar 200 mil laut dari garis pangkal yang berhak diklaim Indonesia sementara itu berbenturan dengan klaim sembilan negara tetangga, yakni Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua Nugini, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

Pada 1969, Indonesia menyelesaikan 18 perjanjian perbatasan dengan delapan negara tetangga. Selengkapnya bisa dilihat dari infografis Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Januari 2019) sebagai berikut:

Adapun penelusuran klaim dilakukan melalui mesin pencarian Google dengan mengetikkan kata kunci berupa kalimat. Contohnya, klaim yang berbunyi "Kami berkomitmen untuk merancang strategi cerdas untuk mengatasi kelangkaan listrik, mengurangi biaya produksi, mengeliminasi subsidi, dan meningkatkan rasio elektrifikasi sampai 100%" memiliki kata kunci rasio elektrifikasi sampai 100%. Oleh karena itu, penulis langsung mengetikkan kata kunci berupa kalimat tersebut dan akan keluar banyak sumber mengenai elektrifikasi. Namun, kerap kali penulis juga menyebutkan lembaga pemerintahan terkait setelah kata kunci untuk mendapat data langsung dari sumber utama. Penulis pun mendapatkan data update informasi sub-sektor ketenagalistrikan dari web Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sumber informasi tersebut menyatakan bahwa rasio elektrifikasi Indonesia pada Juli 2019 mencapai 98,81 persen ("Update Informasi", 2019, p. 14).

Gambar 3.5 Rasio Elektrifikasi Indonesia



Penulis kerap berkonsultasi dengan Astudestra dan Angelina mengenai kelayakan sumber yang penulis dapat. Misalnya, klaim yang berbunyi "Kami berkomitmen membangun karakter dan potensi pariwisata, melalui; (1) Pengembangan kawasan pariwisata berbasis pada

segitiga emas (golden triangle) pariwisata di titik strategis kawasan Indonesia untuk membangun *intersullar tourism* dan budaya lokal, seperti kawasan bonaken-wakatobi-raja empat". Penulis mendapatkan hanya mendapatkan sedikit sumber mengenai segitiga emas, salah satunya Detak. Namun, wilayah yang disebutkan dalam sumber bukan wilayah yang disebutkan dalam klaim, yaitu daerah Halmahera Barat, Ternate, dan Tidore. Penulis disarankan untuk mencari sumber lain yang lebih terpercaya. Penelusuran penulis pun menemukan program segitiga emas ini telah dilakukan di beberapa daerah oleh pemerintah daerah masing-masing dan dipublikasikan oleh media daerah. Astudestra menugaskan untuk mencari MoU antara kepala daerah Halmahera Barat, Ternate, dan Tidore. Namun, penulis tidak menemukan dokumen resmi dari pemerintahan mengenai proyek ini. Oleh karena itu, sumber-sumber yang dipakai ditemukan penulis pun digunakan walaupun dari media daerah.

Selain itu, penulis juga sering kesulitan dalam menemukan kata kunci berupa kalimat yang seharusnya dimasukkan dalam mencari klaim. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis mengenai isu yang terdapat di klaim, seperti transportasi, ekonomi, dan keluatan. Oleh karena itu, penulis pun melakukan riset mengenai isu sebelum mencari kebenaran klaim. Penulis juga berkonsultasi dengan pembimbing atau ketua proyek mengenai kata kunci yang akan penulis telusuri. Pembimbing atau ketua proyek pun memberikan saran kepada penulis. Kemudian, penulis pun menelusuri kebenaran klaim dari kata kunci berupa kalimat dari hasil diskusi tersebut. Misalnya, klaim mengenai penambahan jumlah rute perintis yang dilayani. Penulis pun kesulitan menginterpretasi rute perintis. Penulis pun mencari maksud rute perintis ini, yaitu angkutan yang digunakan untuk berniaga. Setelah penulis telusuri rute perintis ini ada banyak, seperti laut dan udara. Oleh karena itu, penulis bertanya pada koordinator proyek mengenai rute perintis apa yang sebenarnya dimaksud dalam klaim. Menurut ketua proyek, rute perintis di klaim ini adalah semua rute, baik laut maupun udara. Penulis pun mendapatkan sumbernya dari web Kementerian Perhubungan dan Laporan 4 Tahun Jokowi-JK.

Setelah menemukan sumber tersebut, penulis memasukkannya pada kolom *Burden of Truth* berupa tautan.

3.3.1.3 Tahap Pengevaluasian Klaim Berdasarkan Bukti

Setelah tahap pengecekan klaim, temuan-temuan dari pengecekan pun dievaluasi dan diberi penilaian oleh ketua proyek, yaitu Astudestra dan Angelina. Dalam proyek Janji Jokowi, proses evaluasi ini dilakukan dengan mengecek sekali lagi tautan-tautan yang telah didapat dari penelusuran fakta. Lalu, penulis akan menerima evaluasi dari Astudestra dan Angelina mengenai tautan tersebut. Ketika tautan yang penulis temukan belum menjadi sumber yang kuat, penulis diharuskan mencari sumber lainnya. Setelah diyakini kebenaran dan sumbernya, Astudestra dan Angelina akan menentukan status dari klaim tersebut. Contohnya, seperti klaim mengenai rasio elektrifikasi Indonesia hingga 100 persen. Berdasarkan hasil penemuan di dokumen Kementerian ESDM ("Update Informasi", 2019, p. 14), rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 98,81 persen pada Juli 2019. Maka, klaim ini mendapatkan status dalam proses dikarenakan pemerintah telah melakukan upaya untuk memenuhi janji.

Adapun contoh klaim yang diberikan status gagal berbunyi "Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti; **Kerusuhan Mei, Trisakti- Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965**". Klaim ini dinyatakan gagal dikarenakan belum ada titik terang dari semua kasus. Salah satu temuan dari klaim yang dinyatakan gagal ini menyebutkan pada kasus kerusuhan Mei didapatkan fakta bahwa Kejaksaan Agung menolak berkas penyidikan Komnas HAM pada 19 September 2003. Penolakan tersebut didasari oleh kurangnya bukti dari kasus tersebut. Kemudian, kasus ini mendapat rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kasus Penghilangan Paksa pada tahun 2009. Namun, rekomendasi ini belum dilakukan hingga sekarang.

Selanjutnya, contoh klaim yang dinyatakan tidak ada bukti berbunyi "Kami akan **memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang bersih**, kompeten, antikorupsi dan komit pada penegakan hukum". Verifikasi klaim ini dilakukan dengan menelusuri rekam jejak calon Jaksa Agung dan Kapolri. Jokowi menunjuk Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Prasetyo merupakan politikus Partai Nasdem. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan pemilihan Prasetyo tidak transparan. Tidak pernah terdengar calon-calon Jaksa Agung diperiksa atau dipanggil presiden. Pelantikan Prasetyo sebagai Jaksa Agung juga sempat ditunda karena menunggu Prasetyo mundur dari Nasdem. Sementara itu, Tito Karnavian ditunjuk langsung oleh Jokowi sebagai Kapolri. Namun, Tito sempat tertulis dalam buku merah yang diduga berisi catatan dari pengusaha Basuki Hariman kepada sejumlah pejabat negara dalam kasus korupsi impor daging. Oleh karena itu, klaim ini mendapat status tidak ada bukti lantaran pemilihan Jaksa Agung dan Kapolri yang bersih pun tidak ada bukti.

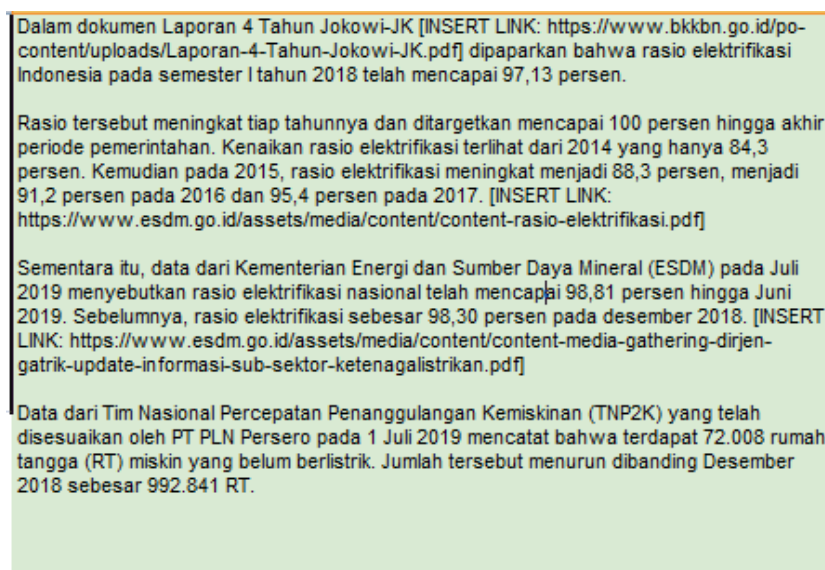
Kemudian, contoh klaim yang mendapatkan status terpenuhi berbunyi "**Peningkatan realisasi penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan, dan perumahan**". Hasil penelusuran klaim ini menyatakan terdapat peningkatan belanja infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan setiap tahunnya selama periode 2015-2018 yang tercatat dalam Laporan Empat Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pada 2015, anggaran infrastruktur mencapai Rp 256 triliun, anggaran kesehatan mencapai Rp 66 triliun, dan anggaran pendidikan mencapai Rp 390 triliun. Anggaran untuk ketiga sektor ini terus bertambah hingga pada 2018, anggaran infrastruktur mencapai Rp 410 triliun, anggaran kesehatan mencapai Rp 111 triliun, dan anggaran Pendidikan mencapai Rp 444 triliun. Oleh karena itu, klaim ini diberikan status terpenuhi.

Selanjutnya, penulis pun membuat narasi dari hasil pengecekan fakta berupa penjelasan dari hasil penemuan dalam bentuk paragraf. Tautan dari hasil penelusuran fakta juga diselipkan di dalam narasi. Hal ini

dikarenakan tautan tersebut akan menjadi rujukan di laman web, sehingga pembaca dapat mengecek sendiri kebenarannya. Lalu, narasi yang dibuat penulis akan diperiksa kembali oleh Astudestra dan Angelina untuk melihat kesesuaian kalimat dan sumber sehingga tidak *misleading*.

Pada awal pembuatan narasi, penulis mengalami kesulitan dalam membuat sebuah paragraf dari hasil pengecekan fakta tersebut. Hal ini dikarenakan keterbatasan kosa kata penulis. Selain itu, pengalaman penulis dalam menuliskan hasil pengecekan fakta pada mata kuliah *Digital Fact Checking* di kampus berbeda ketika di lapangan. Perbedaannya terletak pada format penulisan. Pada mata kuliah *Digital Fact Checking*, format penulisannya berupa poin-poin, berupa klaim, metode, hasil pengecekan, dan kesimpulan. Sedangkan pada proyek ini, penulisan narasi berupa paragraf yang mencakup semua hasil temuan. Oleh karena itu, penulis pun meminta pendapat dari pembimbing atau ketua proyek mengenai hasil tulisan penulis. Pembimbing atau ketua proyek pun memberikan saran kepada penulis sehingga memudahkan penulis dalam memperbaikinya. Lalu, penulis pun merevisi hasil tulisannya hingga mendapat persetujuan dari pembimbing dan ketua proyek. Kemudian, hasil tulisan tersebut diletakkan di kolom teks narasi.

Gambar 3.6 Narasi Janji Jokowi



Dalam dokumen Laporan 4 Tahun Jokowi-JK [INSERT LINK: <https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Laporan-4-Tahun-Jokowi-JK.pdf>] dipaparkan bahwa rasio elektrifikasi Indonesia pada semester I tahun 2018 telah mencapai 97,13 persen.

Rasio tersebut meningkat tiap tahunnya dan ditargetkan mencapai 100 persen hingga akhir periode pemerintahan. Kenaikan rasio elektrifikasi terlihat dari 2014 yang hanya 84,3 persen. Kemudian pada 2015, rasio elektrifikasi meningkat menjadi 88,3 persen, menjadi 91,2 persen pada 2016 dan 95,4 persen pada 2017. [INSERT LINK: <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-rasio-elektifikasi.pdf>]

Sementara itu, data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Juli 2019 menyebutkan rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 98,81 persen hingga Juni 2019. Sebelumnya, rasio elektrifikasi sebesar 98,30 persen pada Desember 2018. [INSERT LINK: <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-media-gathering-dirjen-gatrik-update-informasi-sub-sektor-ketenagalistrikan.pdf>]

Data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang telah disesuaikan oleh PT PLN Persero pada 1 Juli 2019 mencatat bahwa terdapat 72.008 rumah tangga (RT) miskin yang belum berlistrik. Jumlah tersebut menurun dibanding Desember 2018 sebesar 992.841 RT.

Dalam penggarapannya, proyek ini mendapatkan evaluasi dari penanggung jawab proyek, Wahyu Dhyatmika, untuk mengubah penulisan narasi. Format narasi yang berbentuk paragraf pun berubah menjadi poin-poin yang terdiri dari klaim, metode, temuan, dan kesimpulan. Hal ini dikarenakan agar pembaca mengetahui detail bagaimana klaim ditemukan meskipun metode pengecekan telah tertera di web pada halaman berbeda. Perubahan teks narasi terjadi ketika seluruh klaim telah ditulis dengan format paragraf. Oleh karena itu, kami pun mengubah seluruh klaim dengan format narasi yang baru.

Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam dua model penulisan narasi ini. Menurut penulis, kelebihan penulisan narasi dalam bentuk poin adalah pembaca dapat membaca dengan jelas penjabaran pengecekan fakta. Pembaca dapat mengetahui dengan mudah alur dari pengecekan fakta. Hal ini dikarenakan poin-poin tersebut mencakup penjelasan metode pengecekan, dilanjutkan dengan penjelasan temuan, dan diakhiri dengan kesimpulan dari hasil pengecekan. Namun, format poin-poin ini tidak efektif apabila dilakukan untuk klaim yang banyak dan diletakkan dalam satu lembar kerja yang terdiri dari banyak kolom. Hal ini karena berkesan mengulang-ulang penyebutan metode yang sama dalam setiap klaim.

Adapun kelebihan dari penulisan narasi dalam bentuk paragraf adalah lebih simpel karena menjelaskannya secara keseluruhan tanpa terpotong-potong poin. Namun, kelemahan dalam penulisan narasi dengan format paragraf ini adalah sulit untuk mempertahankan pembaca untuk membaca paragraf panjang dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa penulisan dengan format poin-poin lebih efektif dikarenakan pembaca dapat memilih membaca inti dari tulisan tersebut dengan memilih poin yang akan dibaca, seperti temuan dan kesimpulan.

Gambar 3.7 Narasi Janji Jokowi dengan Format Baru

Klaim: Kami berkomitmen untuk merancang strategi cerdas untuk mengatasi kelangkaan listrik, mengurangi biaya produksi, mengeliminasi subsidi, dan meningkatkan rasio elektrifikasi sampai 100 persen.

Metode: Kami menggunakan metode studi dokumen berupa Laporan Lima Tahun Maju Bersama dan Laporan 4 Tahun Jokowi-JK serta penelusuran situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencari informasi terkait ketenagalistrikan.

Temuan:

Laporan 4 Tahun Jokowi-JK [INSERT LINK: <https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Laporan-4-Tahun-Jokowi-JK.pdf>] menyatakan rasio elektrifikasi Indonesia pada semester I 2018 telah mencapai 97,13 persen. Selama periode 2014-2018, rasio tersebut meningkat setiap tahunnya dan ditargetkan mencapai 100 persen hingga akhir pemerintahan Jokowi-JK.

Pada 2014, rasio elektrifikasi hanya sebesar 84,3 persen. [INSERT LINK: <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-rasio-elektifikasi.pdf>] Pada 2015, rasio elektrifikasi meningkat menjadi 88,3 persen. Rasio elektrifikasi kembali naik menjadi 91,2 persen pada 2016. Pada 2017, rasio elektrifikasi menyentuh 95,4 persen.

Untuk 2019, data Kementerian ESDM dalam Laporan Lima Tahun Maju Bersama menunjukkan rasio elektrifikasi telah mencapai 98,9 persen pada semester I 2019. [insert link: <http://ksp.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lima-Tahun-Maju-Bersama-1.pdf>] Sebelumnya, pada Desember 2018, rasio elektrifikasi mencapai 98,30 persen.

Menurut data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang telah disesuaikan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada 1 Juli 2019, terdapat 721.008 rumah tangga (RT) miskin yang belum berlistrik. Jumlah tersebut menurun dibandingkan Desember 2018 di mana masih terdapat 992.841 RT miskin yang belum berlistrik.

Kesimpulan: Berdasarkan temuan di atas, pemerintahan Jokowi-JK masih berproses dalam peningkatan rasio elektrifikasi hingga 100 persen.

TAG: energi, letenagalistrikan, listrik, rasio elektrifikasi, rumah tangga berlistrik, kelangkaan listrik

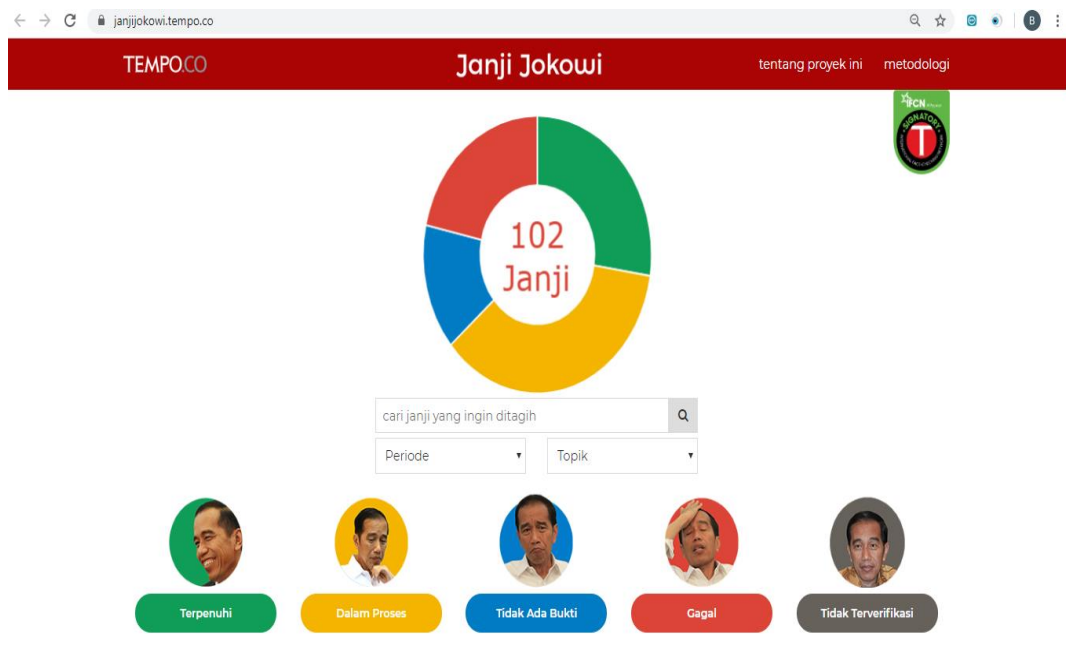
Selanjutnya, penulis pun menginput klaim-klaim beserta hasilnya pada CMS Janji Jokowi. Klaim-klaim yang diinput tidak hanya klaim yang telah dicek faktanya (*checkable*), tetapi juga klaim yang tidak bisa dicek faktanya (*uncheckable*). Proses penginputannya sama seperti membuat artikel di blog, seperti wordpress. Penulis pun tidak lupa menjadikan tautan sebagai *hyperlink* di dalam narasi sehingga nantinya dapat ditekan langsung oleh pembaca menuju sumber.

Gambar 3.8 Penginputan Klaim Janji Jokowi

Judul	Periode	Topik	Status	Keterangan	Action
"Mengintegrasikan" Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sebagai Lingkungan Strategis Pelaksanaan Politik Luar Negeri	Periode 1	Hubungan Internasional	Tidak Terverifikasi	Draft	[Edit] [Share] [Delete]
Aktif dalam Penyelesaian Konflik, Pengjagaan Perdamaian, dan Bina Perdamaian	Periode 1	Hubungan Internasional	Tidak Terverifikasi	Draft	[Edit] [Share] [Delete]
Alternatif Pekerjaan Pelaku Aktivitas Ilegal	Periode 1	Penegakan Hukum	Tidak Ada Bukti	Publik	[Edit] [Share] [Delete]
Anggaran Kesehatan 5% dari APBN	Periode 1	Kebijakan Afirmatif	Terpenuhi	Publik	[Edit] [Share] [Delete]
APBN sebagai Bagian Penting dari Pelayanan Hak-Hak Buruh	Periode 1	Ketenagakerjaan	Tidak Terverifikasi	Draft	[Edit] [Share] [Delete]
Bantuan Hukum Gratis untuk Buruh Migran	Periode 1	Buruh Migran	Terpenuhi	Publik	[Edit] [Share] [Delete]
Berkomitmen Memperjuangkan Biaya Pendidikan Terjangkau	Periode 1	Pendidikan dan Kebudayaan	Tidak Terverifikasi	Draft	[Edit] [Share] [Delete]
Devan Pengawas di DPR	Periode 1	Pertahanan dan Keamanan	Tidak Ada Bukti	Publik	[Edit] [Share] [Delete]

Kemudian, hasil dari penginputan tersebut dapat diakses melalui web janjijokowi.tempo.co.

Gambar 3.9 Tampilan Web Janji Jokowi



3.4 Kendala dan Solusi

Penulis menemukan beberapa kendala dalam masa kerja praktik selama 60 hari. Dari kendala-kendala tersebut, penulis pun menemukan solusi untuk mengatasinya. Sehingga, keberlangsungan proyek pun tidak terhambat. Kendala-kendala dan solusinya adalah sebagai berikut.

1. Penulis kesulitan dalam menemukan kata kunci yang sesuai ketika melakukan pengecekan fakta-fakta, seperti klaim tentang kelautan, ekonomi, dan transportasi. Keterbatasan tersebut membuat hasil pencarian klaim minim. Kendala penulis dalam sulitnya menggunakan kata kunci yang tepat dikarenakan kurangnya pemahaman penulis mengenai isu yang dibicarakan dalam klaim. Oleh karena itu, penulis pun sebisa mungkin mencari tahu atau melakukan riset mengenai isunya terlebih dahulu. Kemudian, penulis baru menelusuri fakta dari klaim. Penulis juga selalu berkonsultasi dengan pembimbing dan ketua proyek mengenai kata kunci. Pembimbing dan ketua proyek pun kerap memberikan saran atas masalah tersebut.
2. Penulis kesulitan dalam membuat narasi dari hasil pengecekan fakta. Hal itu dikarenakan keterbatasan kosa kata penulis. Selain itu, pengalaman penulis dalam menuliskan hasil pengecekan fakta pada mata kuliah *Digital Fact Checking* berbeda ketika di lapangan. Solusi dari kesulitan penulis dalam menulis teks narasi dari hasil pengecekan fakta adalah meminta pendapat pada ketua proyek dan pembimbing atas hasil tulisan penulis. Saran-saran dari pembimbing atau ketua proyek sangat berguna dalam perbaikan penulisan. Kemudian, penulis merevisi hasil tulisannya hingga mendapat persetujuan dari pembimbing dan ketua proyek.